

# **PEREMPUAN DAN POLITIK INDUSTRI KREATIF DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN: LESSON LEARNED DARI INDONESIA DAN THAILAND**

**Mouliza K D Sweinstani**

*Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI*

*moulizadonna@gmail.com*

## **Abstrak**

Sebagai salah satu upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, Indonesia dan Thailand melakukan pengembangan industri kreatif yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi perempuan berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pemerintah kedua negara mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan melalui industri kreatif dan melihat strategi Pemerintah kedua negara untuk merekognisi dan mengakomodasi kepentingan perempuan dalam pembangunan. Dengan menggunakan metode studi dokumen berdasarkan beberapa literatur yang terkait dengan perempuan dan pembangunan, analisis gender, serta dokumen-dokumen resmi baik dari PBB maupun dokumen resmi kedua negara, penulis menemukan bahwa sektor industri kreatif di kedua negara ini masih cenderung condong pada pendekatan Women in Development yang hanya “menambahkan” perempuan dalam roda pembangunan nasional tanpa ada upaya bagi pemberdayaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengembangan sumber daya manusia dan berbagai pelatihan yang dapat menjadi bekal bagi perempuan dalam pembangunan. Di Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari minimnya modal UMKM yang pada awalnya dijanjikan akan menjadi tempat bagi perempuan dalam pembangunan sektor industri kreatif. Sementara di Thailand, banyak perempuan-khususnya yang bekerja di bidang industri hiburan dan pariwisata-yang pada akhirnya justru jatuh pada dunia prostitusi. Kondisi yang terjadi di kedua negara ini menunjukkan bahwa upaya pelibatan perempuan dalam roda pembangunan belum memperhatikan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga, alih-alih mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan justru membuat perempuan terperangkap dalam aral pembangunan itu sendiri.

**Kata Kunci:** Industri Kreatif, Pembangunan Nasional, Women in Development, Gender in Development

## **Abstract**

*As one of the country's strategies to empower women in national development, Indonesia and Thailand develop a creative industry that is expected to be a place for women to participate in each national development. This paper aims to analyze how the governments of both countries include women in development through the creative industry and see the government's strategy to recognize and accommodate women's interests in development. Using documentary data related to women and development, gender analysis, as well as official documents from both the United Nations and official documents of the two countries, the author found that the creative industries in both countries are still inclined towards the Women in Development approach which only “adds” women to the national development without any significant effort for empowerment. This is because there is still a lack of human resource development and various pieces of training that can be a provision for women in development. In Indonesia, this can be seen from the lack of MSME capital which was initially promised to be a place for women in the development of the creative industry sector, while in Thailand, many women - especially those who work in the entertainment and tourism industries - eventually fell into prostitution. Looking at those condition in both countries, we can conclude that the efforts to involve women in development through the creative industry sector have not paid*

*attention to the inequality of relations between men and women. Consequently, instead of including women in development, this action makes women trapped in the drawbacks of development itself.*

**Keyword:** *Creative Industri, National Development, Women in Development, Gender in Development*

## Pendahuluan

Pembangunan bagi sebuah negara merupakan sebuah proses yang penting untuk mencapai kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Dalam rangka melakukan pembangunan nasional di masing-masing negara, beberapa komitmen internasional dibuat agar keberhasilan pembangunan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terwujud tidak hanya oleh suatu negara tertentu namun juga oleh seluruh negara atas nama kemanusiaan dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagai salah satu negara yang telah menyepakati beragam komitmen internasional tentang pembangunan, salah satunya *Sustainable Development Goal's (SDG)*, Indonesia terikat untuk dapat mewujudkan pembangunan dengan mempertimbangkan beragam aspek kehidupan, termasuk kesetaraan gender dalam pembangunan. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam pembangunan sama dengan memperimbangkan pelibatan peran seluruh warga negara dalam pembangunan. Pentingnya pelibatan seluruh warga negara baik laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan dapat diartikan sebagai pemberdayaan dan pembinaan seluruh sumber daya negara guna meningkatkan kompetensi warga negaranya, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya komitmen yang demikian, diharapkan pembangunan tidak lagi menyisakan peran perempuan tetapi dapat meningkatkan serta memperbaiki kondisi indeks pembangunan gender yang sejauh ini masih menyisakan kesenjangan, khususnya kesenjangan ekonomi, antara laki-laki dan perempuan<sup>1</sup>.

Selain Indonesia yang berpijak komitmen internasional dalam pembangunan, Thailand juga menjadi salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang berkomitmen pada kesepakatan antar negara tersebut. Membandingkan kedua negara ini menjadi menarik karena keduanya memiliki pengalaman politik yang hampir mirip. Baik Indonesia maupun Thailand sama-sama dapat dikategorikan sebagai negara dengan fenomena *bureaucratic polity* (Martini, 2012). *Bureaucratic polity* atau masyarakat birokratik merupakan sebuah fenomena penyelenggaraan negara yang tidak sesuai atau melenceng dari sudut pandang demokrasi. Dalam sudut pandang demokrasi, kekuasaan seharusnya ada pada rakyat/ masyarakat yang dapat dimanifestasikan baik oleh partai politik maupun kelompok kepentingan. Dalam hal ini, lembaga lain hanya sebagai penghias/pelengkap saja. Sedangkan dalam *bureaucratic polity* kekuasaan sepenuhnya dikendalikan oleh birokrat (sipil maupun militer) atau juga oleh individu (kelompok) yang memeralat birokrasi sebagai mesin politik. Ciri yang paling menonjol dari fenomena ini adalah digunakannya instrumen birokrasi untuk melanggengkan kekuasaannya dan menyingkirkan peran masyarakat dari ruang politik dan Pemerintahan. Hal ini lah yang terjadi di Indonesia seperti yang ditemukan oleh Jackson (1978) di Indonesia dan Riggs (1966) di Thailand. Ciri lain dari fenomena ini adalah terjadinya penggulingan kekuasaan yang bahkan hingga saat ini masih terjadi di Thailand. Semenjak tahun 1932 tercatat telah terjadi 15 kali kudeta politik, 21 kali pemilu, dan lebih dari 50 kali pergantian kabinet.<sup>2</sup>

Dengan kondisi politik yang sama-sama dapat dikategorikan sebagai negara dengan fenomena *bureaucratic polity*, narasi politik di kedua negara ini menjadi cukup maskulin karena politik menjadi dicirikan dengan narasi-narasi besar tentang kekuasaan. Narasi politik yang demikian, dapat mempengaruhi cara pandang suatu negara terhadap ideologi gender yang dianut yang dapat berimplikasi pada bagaimana pemerintah memberikan akses terhadap setiap gender yang diakui di negara tersebut, termasuk

<sup>1</sup> Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Buku I Agenda Pembangunan Nasional: Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014), perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20905-[Konten\_]...

<sup>2</sup> Tom Wingfield, "Democratization and economic crisis in Thailand : Political business and the changing dynamic of the Thai state," dalam *Political Business in East Asia*, ed. oleh Edmund Gomez, 1st ed. (London: Routledge, 2003), <https://doi.org/10.4324/9780203166338>.

di dalamnya bagaimana pemerintah memberikan akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Perihal kesetaraan gender juga menjadi diskursus menarik di Thailand. Diketahui bahwa selain identitas gender laki-laki dan perempuan terdapat identitas gender lain yang juga diakui di Thailand. Secara umum terdapat empat kategori identitas gender di Thailand dengan beberapa sub-identitas pada masing-masing kategorinya, yaitu heterosexual/tradisional (laki-laki/perempuan), Tom-Dee, Kathoey, dan kategori lainnya.<sup>3</sup> Namun, dari beberapa identitas tersebut, tulisan ini hendak menganalisis kesetaraan gender pada identitas gender tradisional, yaitu laki-laki dan perempuan yang berlaku secara internasional dan sesuai dengan beberapa instrumen kebijakan pembangunan internasional yang telah disepakati Indonesia dan Thailand.

Diskriminasi terhadap perempuan di Thailand secara nyata dapat dilihat dari pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa sektor pekerjaan, tingkat partisipasi kerja perempuan berada di bawah tingkat partisipasi kerja laki-laki. Sedangkan, dalam sektor jasa, tingkat partisipasi kerja perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki. Sektor jasa ini termasuk di dalamnya adalah pekerjaan sebagai asistem rumah tangga, kasir, pelayan restoran dan bar, serta pekerja sex komersial.<sup>4</sup> Apa yang terjadi di Thailand tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dalam pembagian pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan posisi dalam pekerjaan tersebut menyebabkan pula perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pada uraian di atas, tulisan ini hendak menganalisis lebih mendalam tentang bagaimana Pemerintah kedua negara mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan melalui industri kreatif dan

melihat strategi keduanya dalam merekognisi dan mengakomodasi kepentingan perempuan dalam pembangunan. Dengan sama-sama mengembangkan industri kreatif, sektor industri ini diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi perempuan dalam pembangunan. Di Indonesia, gagasan tentang pengembangan industri kreatif telah muncul pada tahun 2002 dan dipromosikan dengan lebih masif lagi pada saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Pada masa tersebut, sebuah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) juga dibentuk untuk meregulasi, mengawasi, dan mengakomodasi pelaku industri kreatif. Beberapa sektor yang tergolong dalam industri ini di Indonesia meliputi, aplikasi dan pengembangan permainan, arsitektur, desain produk, fesyen, desain komunikasi visual, desain interior, seni pertunjukkan, film animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner, music, penerbitan, periklanan, seni rupa, dan televisi serta radio. Sedangkan di Thailand, industri kreatif yang dianggap mampu membuka peluang bagi seluruh warga negaranya dalam rencana pembangunan sejak tahun 2012 dalam *11<sup>th</sup> National Economic and Social Development Plan* (2012-2016). Selain itu, Thailand juga telah membangun suatu badan khusus yang berkewajiban untuk melakukan promosi industri kreatif Thailand melalui sebuah lembaga yang bernama *Thailand Creative Economy Promotion Agency* (TCEPA).

Potensi industri kreatif bagi perempuan di Indonesia dapat dilihat dari partisipasi perempuan, salah satunya dalam subsector yang dijalankan dengan strategi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dari sekitar 46 juta pelaku UMKM, 60% diantaranya adalah perempuan (Kompas, 2018). Sementara di Thailand, potensi industri ini dapat dilihat dari besarnya partisipasi perempuan sebagai *homeworkers* dalam dunia ekonomi digital Thailand yang jumlahnya mencapai 75% dari total pelaku di industri ini di Thailand<sup>5</sup>. Guna melindungi pelaku industri pada subsector ini, Thailand bahkan memiliki Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumahan Tahun 2010 (*Homeworker Protection Act B.E 2553*). Oleh karena itu, ketika perempuan terlibat dalam pembangunan, maka diharapkan pula kepentingan perempuan dapat terakomodasi. Guna menjawab pertanyaan penulis tentang

<sup>3</sup> Peter A Jackson, "Thai research on male homosexuality and transgenderism and the cultural limits of Foucaultian analysis," *Journal of the History of Sexuality* 8, no. 1 (1997): 52–85; William A. Stricklin, *The Prince and I - Miss Olive*, 2019; Sam Winter dan Nuttawut Udomsak, "Male, female and transgender: Stereotypes and self in Thailand," *International Journal of Transgenderism* 6, no. 1 (2002): No Pagination Specified-No Pagination Specified; Winter dan Udomsak.

<sup>4</sup> Liza Romanow, "The Women of Thailand," *Global Majority E-Journal* 3 (2012), /paper/The-Women-of-Thailand-Romanow/dbea1d311c6dacd21d091d-b32457e8009e2db60f.

<sup>5</sup> Kamolrat Intaratat, "Women homeworkers in Thailand's digital economy," *Journal of International Women's Studies* 18, no. 1 (2016): 87–103.

industri kreatif dan perempuan dalam kerangka pembangunan baik di Indonesia maupun di Thailand, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana pemerintah masing-masing negara mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam kebijakan pembangunan dan industri kreatif?”

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjelaskan bagaimana kebijakan pembangunan di masing-masing negara dapat mengakomodasi kepentingan perempuan dan memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi kebijakan industri kreatif di masing-masing negara mampu menjadi wadah bagi pelibatan peran perempuan dalam pembangunan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen berdasarkan beberapa literature yang terkait dengan perempuan dan pembangunan, analisis gender, serta dokumen relevan lainnya.

### **Perempuan dan Pembangunan dalam Tataran Konsep**

Sejak Perang Dunia Kedua (PD II), ketika daerah jajahan meraih kemerdekaan dan bergabung dengan sistem perekonomian dunia, pembangunan dilihat sebagai industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dibungkus dengan apa yang disebut dengan modernisasi.<sup>6</sup> Menurut Huntington dan Nelson pembangunan disamaartikan dengan modernisasi, yaitu suatu proses yang merujuk pada serangkaian perubahan secara keseluruhan pada tataran sosial, ekonomi, intelektual, politik, dan kultural yang berkaitan dengan peralihan masyarakat dari kondisi pedesaan dan agraris yang relative miskin, ke kondisi-kondisi perkotaan dan industrialisasi yang relatif kaya<sup>7</sup>. Isu-isu pembangunan dengan demikian identik dengan upaya yang dilakukan oleh negara-negara pascakolonial untuk mencari dan mempromosikan jati dirinya serta mengejar ketertinggalan dari bangsa lain.

Dalam melaksanakan proses pembangunan tersebut, negara-negara pascakolonial ini kebanyakan mengikuti pembangunan model

Barat (Utara) dengan nilai-nilai Liberalisme, Kapitalisme, dan Demokrasi. Hal ini karena kebanyakan negara-negara ini adalah negara-negara bekas jajahan Barat (Utara). Model pembangunan Utara yang dimaksud adalah model pembangunan liberal yang mengasumsikan bahwa sebab-sebab terjadinya ketimpangan sosio-ekonomi, kekerasan politik, dan ketiadaan partisipasi politik yang demokratis dikarenakan oleh keterbelakangan sosio-ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, jawaban untuk penyakit-penyakit tersebut adalah modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi yang cepat, yang akan menaikkan tingkat kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan di dalam masyarakat itu. Dengan begitu, hal tersebut akan memungkinkan suatu distribusi kekayaan yang lebih adil, memajukan kestabilan politik dan meletakkan landasan bagi partisipasi politik yang lebih luas dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis<sup>8</sup>.

Berdasarkan penjelasan dan model pembangunan liberal yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson, kunci utama dari pembangunan bangsa adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan hal yang pertama kali harus dilakukan dalam proses modernisasi. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan prasyarat pembangunan politik dan kehidupan modern lainnya.<sup>9</sup>

Namun pada faktanya, apa yang diasumsikan dari model bangun negara maju tersebut justru menghasilkan disparitas ekonomi yang semakin tajam di dalam negara-negara berkembang tadi. Mengutip pernyataan Mosse<sup>10</sup> bahwa sejak awal 1970, kesenjangan dalam masyarakat dunia ketiga antara mereka yang mendapatkan keuntungan dari pola pembangunan liberal dengan mereka yang tidak memperoleh keuntungan dari pola itu menjadi semakin lebar. Terlebih, kelompok yang kedua ini jumlahnya semakin lama semakin besar. Kenyataan tersebut akhirnya sampai pada

<sup>8</sup> Huntington dan Nelson.

<sup>9</sup> Edward L. Pinney, “Aspects of Political Development. By Lucian W. Pye. The Little, Brown Series in Comparative Politics. (Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1966. Pp. Ix, 205. 5.00.)” *American Political Science Review* 61, no. 1 (Maret 1967): 208–9, <https://doi.org/10.1017/S0003055400132757>.

<sup>10</sup> Mosse, *Half the world half a chance: An introduction to gender and development*.

<sup>6</sup> Julia Cleves Mosse, *Half the world half a chance: An introduction to gender and development* (Oxfam GB, 1993).

<sup>7</sup> Samuel P Huntington dan Joan Nelson, “Partisipasi politik di negara berkembang,” 1994.

kesimpulan bahwa modernisasi yang ditanamkan kepada masyarakat dunia ketiga yang masih belum mapan baik secara integrasi sosial maupun kondisi ekonomi justru dapat memperburuk keadaan.

Selain menyebabkan disparitas antara mereka yang mendapat keuntungan dan mereka yang tidak mendapat keuntungan menjadi semakin tajam. Hal lain yang perlu ditekankan dalam pembangunan model tersebut adalah adanya upaya untuk menghilangkan faktor manusia yang menyebabkan adanya asumsi bahwa sebagian orang tidak layak untuk dimasukkan dalam agenda pembangunan. Sekalipun jika ada perhatian pada arah tersebut, faktor manusia tetap akan dilihat sebagai penerima pasif pembangunan. Akibatnya asumsi ini gagal untuk memaknai bahwa manusia sebenarnya adalah perempuan dan laki-laki yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda. Model ini kurang memperhatikan adanya kelompok rentan termasuk perempuan yang juga perlu diperhatikan bahkan perlu diangkat sebagai tujuan utama kesejahteraan. Dalam kacamata studi gender dan pembangunan, model pembangunan yang demikian berakibat pada alienasi peran perempuan dalam pembangunan. Apalagi jika mereka (perempuan) berasal dari kelompok miskin, maka akan justru akan semakin termiskinkan akibat adanya pembangunan.

Oleh karena itu, dalam membicarakan partisipasi perempuan dalam pembangunan, diperlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep pembangunan dilihat dalam pendekatan perempuan. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya dalam melihat partisipasi perempuan dalam pembangunan, kita dapat mengidentifikasi bagaimana partisipasi perempuan tersebut dimaknai atau bagaimana sesungguhnya peran perempuan dibaca dalam konteks pembangunan.

Menurut Mosse<sup>11</sup>, setidaknya ada tiga pendekatan yang dapat dilihat dalam mengidentifikasi peran perempuan dalam pembangunan. Pertama, ungkapan perempuan dalam pembangunan, yang selanjutnya disebut *Women in Development (WID)*, diartikan sebagai sebuah pemikiran pertama mengenai peran perempuan dalam pembangunan. WID digunakan sebagai steno bagi pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan

yang sebagian besar didasarkan pada paradigma modernisasi.<sup>12</sup> Pendekatan ini difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, tepat, dan yang akan meringankan beban kerja perempuan. WID bertujuan untuk menekankan sisi produktif kerja perempuan, khususnya sebagai penghasil pendapatan, dengan mengabaikan sisi reproduktifnya.

Senada dengan Mosse, Shirin M Rai (2002) dalam bukunya *Gender and the Political Economy of Development*, juga memberikan penjelasan tentang WID. Menurut Rai (2012), WID ini muncul akibat adanya masalah terhadap pengasingan peran perempuan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu WID bertujuan untuk mengintegrasikan peran perempuan dalam pembangunan dengan melakukan strategi yang menitik beratkan pada perempuan itu sendiri, seperti peningkatan produktivitas dan pendapatan perempuan, meningkatkan kemampuan perempuan untuk menjaga rumah tangga, dan sebagainya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menciptakan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan mengikutsertakan perempuan.<sup>13</sup>

Pendekatan kedua tentang perempuan dalam pembangunan yang dikemukakan Mosse adalah *Women and Development (WAD)*. WAD merupakan suatu pendekatan feminis neo-Marxis yang berasal satu satu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi seperti apa yang dikemukakan oleh para liberalis. Pendekatan ini tidak menitikberatkan pada strategi untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan, namun pendekatan ini justru menunjukkan bahwa perempuan selalu penting dalam secara ekonomi dan kerja yang dilakukan dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. Pendekatan WAD berasumsi bahwa posisi perempuan akan lebih baik selama dan ketika struktur internasional menjadi lebih adil dan dalam hal ini, pendekatan itu cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender khusus perempuan. WAD cenderung menitikberatkan

<sup>11</sup> Mosse.

<sup>12</sup> Eva M Rathgeber, "WID, WAD, GAD: Trends in research and practice," *The journal of developing areas* 24, no. 4 (1990): 489–502.

<sup>13</sup> Shirin. Rai, *Gender and the political economy of development : from nationalism to globalization* (Polity Press, 2002).

kepada kegiatan yang mendatangkan pendapatan dan kurang mengindahkan tenaga perempuan yang disumbangkan dalam mempertahankan keluarga dan rumah tangga.<sup>14</sup>

Selanjutnya pendekatan ketiga yang dikemukakan oleh Mosse adalah pendekatan Gender and Development (GAD). GAD dianggap sebagai satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan oleh perempuan, baik kerja produktif, reproduktif, privat, maupun publik, dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan yang melakukan pemberdayaan perempuan dalam dinamika pembangunan yang lebih terkait dengan pendekatan *bottom up* daripada pendekatan *top down*.<sup>15</sup> Dengan demikian hal ini berarti pendekatan GAD adalah pendekatan yang benar-benar memperhatikan dan memberikan peluang terhadap perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan tanpa perlu khawatir hak-haknya tidak akan terpenuhi.

Rai (2002) menambahkan dalam bukunya, GAD merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan yang melihat hubungan sosial yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan serta sifat dasar mereka yang sering kali menjadi problem mayor dikotomi antara laki-laki dan perempuan. GAD melihat bahwa masalah utama yang terkait dengan perempuan dan pembangunan adalah adanya ketimpangan relasi yang pada akhirnya menghalangi partisipasi perempuan dalam pembangunan. Oleh karena itu, dengan menggunakan strategi pemberdayaan, tujuan dari GAD adalah untuk mencipatakan keadilan dalam pembangunan baik untuk laki-laki maupun perempuan sebagai partisipan penuh dalam proses pembuatan keputusan. Baik perempuan maupun laki-laki menurut pendekatan ini bukan

lagi merupakan objek dari pembangunan namun mereka juga turut serta dalam konstruksi desain pembangunan tersebut. Ketiga pendekatan perempuan dalam pembangunan di atas penulis gunakan untuk mengidentifikasi bagaimana partisipasi perempuan dalam pembangunan khususnya pada sector industri kreatif di Indonesia dan Thailand. Apakah perempuan diberdayakan dalam pembangunan, atau perempuan hanya menjad objek atau sekalipun turut serta dalam pembangunan, apakah keikutsertaan tersebut sudah berlandaskan pada dan berupaya untuk mengubah relasi yang tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan.

### Perempuan dan Ironi Pembangunan

Selain melihat aspek pendidikan dan kesehatan, indikator ekonomi berbasis standar hidup layak merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur hasil pembangunan berperspektif gender. Alih-alih mengejar pembangunan nasional melalui beragam kebijakan ekonomi yang mutakhir, pembangunan dengan cara modernisasi justru dapat jatuh pada cara-cara yang secara tidak disadari melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui pembagian pekerjaan yang didasarkan pada jenis kelamin (*sexual division of labor*). Pembagian kerja ini pada akhirnya menempatkan perempuan sebagai pihak yang pasif karena adanya *bias laki-laki* dalam proyek pembangunan. Lebih lanjut, pembagian kerja ini dapat berakibat pada kondisi kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu cara untuk melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan adalah dengan melihat fakta bahwa dunia perekonomian masih didominasi oleh laki-laki. Dominasi ini antara lain dapat dilihat dari perbandingan gaji/upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan yang mana hal ini dapat memengaruhi pengeluaran perkapita oleh keduanya.

Di Indonesia, sepanjang tahun 2010 hingga saat ini, pertumbuhan pengeluaran per kapita yang diperoleh perempuan selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, rasio pertumbuhan pengeluaran per kapita laki-laki berkisar antara 1,5 persen

<sup>14</sup> Mosse, *Half the world half a chance: An introduction to gender and development*.

<sup>15</sup> E W Nafziger, "From Seers to Sen: The Meaning of Economic Development," *Research Paper*, no. June 2005 (2006): 17, [https://doi.org/10.1057/9780230801462\\_3](https://doi.org/10.1057/9780230801462_3); Shahrashoub Razavi dan Carol Miller, "From WID to GAD: Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse," *Occasional paper* 1, no. February (1995): 1161–64, <https://doi.org/10.1001/archneur.63.8.1161>; Rathgeber, "WID, WAD, GAD: Trends in research and practice."

sampai 4,88 persen. Sementara rasio pertumbuhan pengeluaran perempuan hanya 0,09- 4,11 persen. Termasuk ketika pada tahun 2019, di mana baik rasio pertumbuhan pengeluaran per kapita laki-laki maupun perempuan samasama mengalami penurunan, kedudukan perempuan masih tetap lebih rendah ketimbang laki-laki, atau pengeluaran per kapita perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki.



Gambar 1. Pertumbuhan Rasio Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Juta Rupiah/orang/tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin, tahun 2010-2019

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020

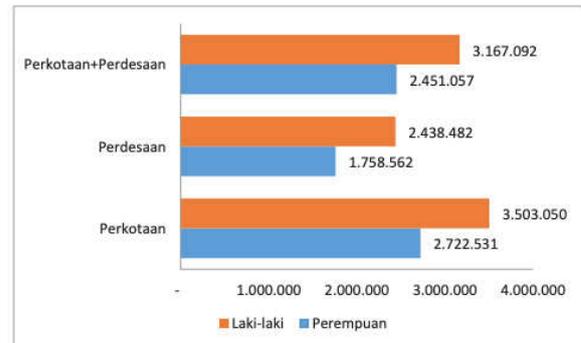
Ada banyak faktor yang menyebabkan kesenjangan pengeluaran per kapita pada perempuan. Salah satu faktor utama kesenjangan ekonomi ini dapat dilihat dari perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Secara umum, rata-rata upah/gaji yang diterima perempuan selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki. Kondisi ini berlaku secara global dalam latar apapun, termasuk ketika dilihat dari lokasi tinggal dan jenjang pendidikan perempuan. Baik perempuan yang tinggal di pedesaan maupun diperkotaan serta perempuan berpendidikan tinggi maupun tidak, upah/gaji perempuan masih tertinggal dibanding dengan laki-laki.

Tabel 1. Perbandingan Upah Laki-laki dan Perempuan di Indonesia

Thn	Upah		Rasio Upah Perempuan terhadap Laki-laki
	Laki-Laki	Perempuan	
2010	Rp1.294.867	Rp1.024.991	0,79
2011	Rp1.437.764	Rp1.148.216	0,8
2012	Rp1.538.887	Rp1.235.824	0,8
2013	Rp2.069.280	Rp1.622.863	0,78
2014	Rp1.868.203	Rp1.490.202	0,8

2015	Rp1.944.300	Rp1.675.300	0,86
2016	Rp2.435.619	Rp1.977.207	0,81
2017	Rp2.624.319	Rp2.070.274	0,79
2018	Rp2.738.739	Rp2.178.134	0,8

Sumber: Diolah penulis dari Sakernas 2014, Sakernas 2019, dan Indeks Pembangunan Gender 2018



Gambar 2. Perbandingan gaji/upah bersih laki-laki dan perempuan berdasarkan tempat tinggal, tahun 2010-2019

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020

Gambar 2. Perbandingan gaji/upah bersih laki-laki dan perempuan berdasarkan tingkat pendidikan, tahun 2010-2019

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2020

Kondisi ketimpangan ekonomi dengan adanya gap upah antara perempuan dan laki-laki juga terjadi di Thailand. Beberapa studi terdahulu di Thailand menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan upah (*gender pay gaps*) antara pekerja laki-laki dan perempuan baik yang dilihat secara umum maupun dilihat dari beberapa sektor tertentu.<sup>16</sup> Studi-studi tersebut menyimpulkan bahwa perempuan menerima

<sup>16</sup> Chatmanee Khorpetch dan Kiriya Kulkolkarn, "Gender Wage Discrimination in the Thai Labor Market (in Thai)," *Applied Economics Journal* 18, no. 2 (2011): 17-31; C. S. Mutsaklisana, "Essays in labor and development economics" (Disertasi, Riverside, University of California, 2011); J. Wathanumsuk, S. Sajjanand, dan O. Srisawaluk, "Gender Pay Gap: A Case study of Automobile Industry at Well Grow Industrial Estates in Chachoengsao Province" (2nd STOU Graduate Research Conference, Nonthaburi, Thailand: Sukhothai Thammathirat Open University, 2012); Wathanumsuk, Sajjanand, dan Srisawaluk; N Maithongdee, "Gender discrimination and wage differentials: The case of private employees in professional occupations," *Unpublished master's thesis*. National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, 2010; Theepakorn Jithitikulchai, "Do Thai Women Earn Less Than Men in Thailand?," Available at SSRN 2984737, 2016.

upah lebih kecil dari pada laki-laki sekalipun dalam satu dekade terakhir, celah ketimpangan tersebut semakin menyempit seiring dengan adanya modernisasi yang terjadi di Thailand dan tingkat pendidikan perempuan yang semakin baik.<sup>17</sup> Perihal berkurangnya celah ketimpangan upah laki-laki dan perempuan di Thailand dapat diketahui dari hasil analisa Paneenawat & Liao<sup>18</sup> yang mendekompositkan data survey angkatan kerja pada tahun 1985, 1995, 2005, dan 2017. Dari hasil analisis dekomposit Blinder-Oaxaca nya, diketahui bahwa terdapat celah positif ketimpangan upah laki-laki dan perempuan dan terus menurun dari angka 0,344 pada tahun 1985 ke angka 0,033 pada tahun 2017.

Tabel. 2 Hasil analisis dekomposit Blinder-Oaxaca Hasil Survey Angkatan Kerja Thailand 1985-2017

	1985	1995	2005	2017				
<b>Total Difference</b>	0.344	0.141	0.105	0.033				
<b>Unexplained</b>	0.162	0.200	0.183	0.134				
<b>Explained</b>	0.182	-0.059	-0.077	-0.101				
Explained details:								
Education:	0.008	2.26%	-0.043	-30.52%	-0.071	-67.81%	-0.079	-243.52%
Primary level	0.004		0.001		-0.004			-0.050
Secondary level	0.015		0.008		0.020			-0.052
University level	-0.012		-0.052		-0.088			0.022
Age&Age square:	0.106	30.74%	0.053	37.90%	0.011	10.70%		46.17%
Age	0.308		0.136		0.031			0.024
Age squared	-0.203		-0.082		-0.020			-0.009
Industry variables	0.009	2.55%	-0.003	-1.81%	-0.002	-2.37%		-35.99%
Occupation variables	0.039	11.24%	-0.072	-51.20%	-0.018	-17.04%		-82.46%
Regions	-0.012	-3.52%	-0.007	-4.77%	-0.003	-3.18%	-0.001	-3.36%

Sumber: Paneenawat & Liao (2019)

Tabel 3. Ringkasan Hasil Survey Angkatan kerja Thailand 1985-2017

	With children		Without children	
	Female	Male	Female	Male
Mean of labor force participation	0.679	0.838	0.764	0.872
Log hourly wage	3.563	3.693	3.831	3.859
Log monthly wage	8.805	8.959	9.076	9.125
Age	36.509	36.529	42.909	41.357
Education:				
Primary level	0.609	0.565	0.570	0.499
Secondary level	0.310	0.364	0.261	0.359
University level	0.074	0.063	0.152	0.125
Observations	1,365,789	1,180,178	667,066	597,201

Sumber: Paneenawat & Liao (2019)

Faktor modernisasi dan meningkatnya latar belakang pendidikan pekerja perempuan di Thailand sayangnya tidak lantas membuat perempuan mendapatkan upah yang sepadan dengan latar belakangnya dan setara dengan laki-laki dengan latar belakang yang sama. Dapat dilihat dalam Tabel 3, hingga tahun 2017 perempuan masih menerima upah lebih kecil daripada laki-laki. Apalagi bagi perempuan dengan anak, ketimpangan upah mereka

<sup>17</sup> Voraprapa Nakavachara, "Superior female education: Explaining the gender earnings gap trend in Thailand," *Journal of Asian Economics* 21, no. 2 (2010): 198–218; Khorpech dan Kulkolkarn, "Gender Wage Discrimination in the Thai Labor Market (in Thai)"; Minh-Tam Thi Bui dan Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat, "Gender Wage Inequality in Thailand: A Sectoral Perspective," *International Journal of Behavioral Science* 10 (2015): 2, <https://doi.org/10.14456/IJBS.2015.40>; Lusi Liao dan Sasiwimon Warunsiri Paweenawat, "Parenthood Penalty and Gender Wage Gap: Recent Evidence from Thailand Abstract," *Research Workshop Are Gratefully Acknowledged* 1, no. 102 (2019): 47–47.

<sup>18</sup> Liao dan Paweenawat, "Parenthood Penalty and Gender Wage Gap: Recent Evidence from Thailand Abstract."

dibandingkan dengan laki-laki (baik dengan anak atau tidak) dan perempuan tidak dengan anak terlihat semakin tajam. Jithitikulchai<sup>19</sup> dalam riset terbarunya tentang ketidakadilan upah di Thailand berdasarkan gender menyimpulkan bahwa perempuan dengan latar belakang pendidikan tinggi, memegang posisi dalam firma kecil, atau memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun tetap saja menerima upah lebih kecil dari laki-laki. Dengan kata lain, jelas bahwa disparitas upah pekerja laki-laki dan perempuan tersebut bukan karena faktor latar belakang pendidikan dan produktivitas yang rendah. Pekerja perempuan di Thailand umumnya memiliki tingkat pendidikan yang baik (menyelesaikan pendidikan lebih dari 12 tahun). Rata-rata dari mereka bahkan memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada pekerja laki-laki.<sup>20</sup> Sementara itu, berkaitan dengan produktivitas Khorpetch & Kulkolkarn<sup>21</sup> menemukan dalam risetnya bahwa perempuan Thailand memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi daripada laki-laki. Oleh karena itu, faktor diskriminasi di tempat kerja jelas dapat disimpulkan menjadi faktor pendorong terjadinya disparitas upah antara laki-laki dan perempuan di Thailand.<sup>22</sup>

Salah satu bentuk diskriminasi tersebut dapat dilihat dari bagaimana akses perempuan terhadap pekerjaan yang antara lain dapat dianalisis melalui rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan. Jithitikulchai<sup>23</sup> menemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Thailand hampir 16 persen di bawah laki-laki (71 persen versus 87 persen pada 2013). Demikian juga dilihat dari data survey angkatan kerja tahun 2017 (lihat tabel 3), partisipasi kerja perempuan juga masih dibawah laki-laki. Sementara itu, dibandingkan dengan data tahun 2020, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan justru semakin turun, yaitu berada pada angka 67,21% dan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki adalah sebesar 85,21%.<sup>24</sup>

Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah tersebut kemungkinan besar terkait dengan prospek pekerjaan yang kurang menjanjikan bagi perempuan. Perempuan lebih cenderung menjadi pekerja keluarga yang tidak dibayar (30 persen untuk perempuan versus 16 persen untuk laki-laki) daripada pekerja diluar seperti untuk perusahaan swasta (33 persen untuk perempuan versus 36 persen untuk laki-laki). Bagi mereka yang bekerja di luarpun, sebagian besar posisi untuk perempuan berada di tingkat pekerjaan rendah (68 persen untuk perempuan versus 61 persen untuk laki-laki) seperti pekerja layanan dan penjualan tingkat rendah; pekerja pertanian, kehutanan, dan perikanan; atau pekerjaan dasar lainnya.<sup>25</sup> Penyebab lain dari terdapatnya perbedaan penerimaan upah tersebut menurut Bui & Permpoonwiwat<sup>26</sup> adalah segregasi pekerjaan yang digeluti perempuan dan laki-laki di Thailand. Pangsa pekerjaan perempuan paling besar adalah pekerjaan dalam rumah tangga pribadi dan pendidikan. Namun, ada sektor-sektor baru yang menarik lebih banyak perempuan untuk bekerja daripada laki-laki, seperti intermediasi keuangan, kesehatan dan pekerjaan sosial, hotel dan restoran. Peningkatan yang cukup besar bahkan terlihat pada sektor intermediasi keuangan dibandingkan dengan partisipasi pada tahun 1996. Dengan demikian, kondisi tersebut justru memperlihatkan bahwa sektor jasa menjadi tempat bekerja yang menarik bagi perempuan.

Gambar 3. Perbandingan partisipasi kerja laki-laki dan perempuan berdasarkan sektor pekerjaan

Sumber: Bui & Permpoonwiwat, 2015

Melihat data-data berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam pembangunan yang dilihat dari sudut pandang pembangunan ekonomi tersebut, diketahui bahwa sektor ekonomi yang menjadi pilar utama pembangunan ala kaum modernis/liberalis masih di dominasi oleh laki-laki. Seperti analisa Mosse<sup>27</sup>,

Male,” 2021, <https://tradingeconomics.com/thailand/labor-force-participation-rate-female-percent-of-female-population-ages-15-64-modeled-ilo-estimate-wb-data.html%20pada%2019%20mei%202021>.

<sup>19</sup> Jithitikulchai, “Do Thai Women Earn Less Than Men in Thailand?”

<sup>20</sup> Jithitikulchai.

<sup>21</sup> Khorpetch dan Kulkolkarn, “Gender Wage Discrimination in the Thai Labor Market (in Thai).”

<sup>22</sup> Khorpetch dan Kulkolkarn.

<sup>23</sup> Jithitikulchai, “Do Thai Women Earn Less Than Men in Thailand?”

<sup>24</sup> Trading Economics, “Labor Force Participation Rate,

<sup>25</sup> Jithitikulchai, “Do Thai Women Earn Less Than Men in Thailand?”

<sup>26</sup> Minh-Tam Thi Bui dan Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat, “Gender Wage Inequality in Thailand.”

<sup>27</sup> Mosse, *Half the world half a chance: An introduction to*

pembangunan liberal menyisakan mereka yang tertinggal, dan dalam hal ini adalah perempuan. Dengan kata lain, dalam sektor ekonomi secara umum, perempuan masih tertinggal dalam proses pembangunan.

### **Dilema Partisipasi Perempuan dalam Sektor Industri Kreatif**

Dalam proses pembangunan di beberapa negara, industri kreatif menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan yang cukup menjanjikan karena potensi dari industri tersebut dapat menjadi salah satu ciri khas daerah/negara yang memiliki nilai budaya dan Hak Kekayaan Intelektual tinggi. Di Indonesia, Industri kreatif telah menjadi salah satu industri yang cukup berhasil dan menjanjikan sejak tahun 2002. Bahkan pada tahun 2006, Mari Elka Pangestu, Menteri Industri Kreatif pada kabinet Indonesia Bersatu II, membentuk program *Indonesia Design Power (IDP)* yang bertujuan untuk mempercepat laju industri kreatif masyarakat Indonesia. Beberapa arah dari pengembangan industri kreatif tersebut adalah pengembangan yang lebih menitikberatkan pada industri berbasis: (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industri*) termasuk pula kuliner tradisional; (2) lapangan usaha kreatif (*creative industri*), dan (3) Hak Kekayaan Intelektual seperti hak cipta (*copyright industri*).<sup>28</sup>

Berdasarkan pada data statistik dan hasil survey Ekonomi Kreatif tahun 2016, kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional adalah sebesar 7,44%. Jumlah ini bahkan mampu menandingi kontribusi ekonomi kreatif Singapura terhadap perekonomian nasionalnya yang hanya sebesar 5,70%. Sementara itu, perihal industri kreatif di Thailand telah menjadi fokus pengembangan ekonomi pemerintah sejak tahun 2000 dengan melihat bahwa industri kreatif merupakan ide baru dalam kekuatan ekonomi yang didukung oleh daya kreatifitas dan inovasi serta modal manusia dan budaya. Selain itu, Industri Kreatif di Thailand juga berasosiasi

*gender and development.*

<sup>28</sup> Trisninawati, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengusaha Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Industri Kerajinan Tenun Songket Di Kota Palembang)," *Prosiding Seminar Nasional Economic Globalization Trends & Risk for Development Country.*, 2014.

dengan sector budaya dan media.

Berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pengembangan industri kreatif, terdapat banyak peran yang dapat diperankan oleh perempuan. Statistik ekonomi kreatif menunjukkan bahwa pelaku industri kreatif di Indonesia didominasi oleh perempuan (54,74%) dan pengusaha ekonomi kreatif di Indonesia juga sebagian besar didominasi oleh perempuan (54,96%) khususnya pada subsector kuliner (5 dan Fashion (54,25%). Dalam subsektor lainnya, seperti bidang seni secara umum, perempuan bahkan saat ini tidak hanya menjadi objek dari seni itu sendiri (terutama lebih banyak pada bidang seni rupa) namun juga menjadi subjek atau pelaku seni. Pada tahun 1980an, ketertarikan perempuan untuk menggeluti bidang seni rupa mulai marak. Jumlah perupa perempuan ini selanjutnya terus bertambah dan turut serta dalam dinamika pembangunan terutama setelah runtuhnya rezim orde baru.<sup>29</sup> Begitu pula dengan bidang seni lainnya, peran perempuan juga sudah cukup terlihat dalam mendukung roda pembangunan. Selanjutnya, dilihat dari sektor UMKM di Indonesia, Arif Hanoeboen menyatakan bahwa jumlah perempuan sebagai pelaku UMKM cukup signifikan. Sekalipun data mengenai keterlibatan perempuan dalam usaha mikro, kecil dan menengah masih sangatlah minim, diyakini berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa mayoritas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dijalankan oleh perempuan, khususnya pada industri rumahan berbasis ekonomi kreatif yang dikelola oleh rumah tangga-rumah tangga.<sup>30</sup>

Namun demikian, data menunjukkan bahwa dominasi perempuan dalam sektor industri kreatif berbanding terbalik dengan penghasilan yang diperoleh perempuan dari industri ini. Seolah menjadi permasalahan klise tentang ketimpangan pendapatan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan, permasalahan inipun terjadi pada sektor industri kreatif. Pada tahun 2016, diketahui bahwa rata-rata upah tenaga kerja ekonomi kreatif laki-laki adalah sebesar 2.281.582 rupiah, sementara rata-rata upah perempuan pada industri ini hanya sebesar 1.818.698. Selain

<sup>29</sup> Dimuat dalam Majalah Seni Rupa Visual Arts Oktober/November 2004. Hl, 38-41

<sup>30</sup> Hasil riset yang dilakukan oleh Arief Hanoeboen yang dikutip oleh Trisninawati. (Trisninawati, 2014, Hlm. 3)

permasalahan ketimpangan upah, masalah lain yang juga harus dihadapi oleh perempuan dalam industri ini adalah perihal permodalan. Sekitar 92,37% modal dalam sektor industri ini berasal dari modal pribadi. Bagi perempuan tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua perempuan memiliki kemandirian finansial. Terlebih di beberapa daerah yang masih berkultur sangat patriarkhis, hak kepemilikan atas asset bisa saja tidak berada di tangan perempuan. Jikalau modal dalam industri ini diperoleh dari modal asing atau investor dalam negeri, perempuan tetap saja masih kurang diuntungkan karena pemodal cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi pada subsektor aplikasi, kriya, penerbitan, televisi dan radio, serta perfilman yang di dominasi oleh pelaku industri kreatif laki-laki.

Belum selesai tentang persoalan ketimpangan pendapatan dan modal, perempuan juga masih harus menghadapi masalah lain yang tidak kalah penting, yaitu Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/ Hak Cipta. Seperti yang diketahui, industri kreatif sangat lekat dengan hasil karya seseorang yang unik dan patut untuk diapresiasi dalam bentuk pengakuan atau rekognisi atas suatu mahakarya. Namun secara umum, sebagian besar industri kreatif di Indonesia belum memiliki HKI. Hanya 11, 05% pelaku industri kreatif yang memiliki HKI atas karya kreatifnya. Subsektor dengan persentase kepemilikan HKI tertinggi adalah subsector perfilman, animasi, dan video. Lagi-lagi perempuan sangat minim menggeluti subsector tersebut.

Sementara itu di Thailand, peran perempuan dalam pembangunan khususnya dalam sektor industri kreatif dapat ditelusuri jejaknya dengan terlebih dahulu memahami tiga tahapan pengembangan industri kreatif di negara ini di bawah kepemimpinan Thaksin, Abisit, dan Yinluck. Pada awal tahun 2000 hingga pertengahan tahun 2008, di bawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra, embrio dari pengembangan industri kreatif di Thailand mulai dihidupkan dengan mengembangkan sector kebudayaan Thailand. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Abisit, sektor industri kreatif dikembangkan lebih besar kembali yang dapat ditunjukkan dengan semakin meluasnya bidang industri kreatif yang semakin memungkinkan perempuan untuk berperan dalam bidang ini. Setidaknya

ada lima belas bidang industri kreatif yang dikembangkan pada masa ini yang tidak hanya didasarkan pada sektor budaya namun juga pada pengetahuan kreatif. Mulai dari kerajinan tangan tradisional hingga desain terkomputerisasi yang modern. Sementara itu, pada masa Yinluck Shinawatra, pengembangan Industri kreatif dapat dikatakan berada pada fase hibernasi dikarenakan kurangnya komitmen pemerintah dan situasi politik yang kurnag mendukung. Pada masa ini hanya ada lima bidang utama yang ditekankan dalam pengembangan industri kreatif, yaitu perfilman, kuliner Thailand, pariwisata, desain dan olahraga. Dengan semakin sempitnya bidang industri kreatif dan tidak optimalnya implementasi kebijakan dikarenakan kondisi politik yang bergejolak, maka peran perempuan dalam pembangunan khususnya dalam industri kreatif ini pada akhirnya banyak yang kurang tepat sasaran.<sup>31</sup>

**Tabel. 2 Bidang Industri Kreatif Thailand dalam Formulasi Kebijakan Industri Kreatif Masa Pemerintahan Abisit**

Warisan Budaya	Seni	Media	Kreasi Fungsional
Kerajinan Thailand	Semi Pertunjukan	Video dan Perfilman	Desain, Fasion, Arsitektur,
Eko-Wisata	Karya Visual	Perencanaan	Periklanan,
Kuliner Thailand		Penyiaran	Pernagkat lunak
Pengobatan		Industri Musik	
Tradisional Thailand			

Dalam sektor pariwisata misalnya, di satu sisi Pemerintah Thailand memang sangat menggalakkan sektor ini dan menjadikan Thailand sebagai destinasi pariwisata dari berbagai negara. Di sisi lain, dikarenakan kurangnya pemberdayaan perempuan dalam arus pembangunan, sektor pariwisata justru disalahgunakan untuk tidak saja menjadi detinasi wisata budaya atau alam, namun juga destinasi “wisata prostitusi”. Berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh humantrafficking.org, Thailand menjadi sumber, transit, dan destinasi perdagangan manusia termasuk dalam rupa prostitusi. Salah satu distrik prstitusi yang cukup terkenal di mata dunia yang berada di Thailand adalah Patpong yang terletak di Bangkok.

### **Perempuan dan Industri Kreatif: Bukan Sekadar Pelibatan**

Apa yang terjadi di Indonesia dan Thailand

<sup>31</sup> Alongkorn Parivudhiphongs, “Is there a creative industries policy in thailand? Actors, ideas and the policy process” (ECPR General Conference, Montreal: Routledge, 2015).

seperti pada uraian di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam sektor industri yang pada mulanya digadang-gadang dapat menjadi wadah bagi perempuan ternyata belum sesuai sasaran. Hal ini dapat terjadi terutama karena perspektif yang dibangun adalah sebatas pada pengikutsertakan perempuan dalam sebuah kegiatan pendukung pembangunan nasional. Di samping kurangnya modal, minimnya pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan yang baik yang mengakibatkan perempuan hanya sekedar menjalankan bisnis saja, menjadi salah satu penghambat pengarusutamaan peran perempuan dalam pembangunan. Keterbatasan akses ke kredit, keahlian dan teknologi merupakan hambatan-hambatan serius bagi perempuan pengusaha untuk melakukan inovasi. Juga kegiatan-kegiatan inovasi yang memerlukan suatu konsentrasi yang besar dan memakan banyak waktu yang bagi banyak perempuan, khususnya sudah menikah dan punya anak, juga dapat menjadi faktor lain yang menghambat terbukanya jalan bagi perempuan memainkan perannya dalam industri kreatif.

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa sekalipun kedua negara ini telah sama-sama berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang salah satunya mensyaratkan adanya keadilan gender serta optimalisasi sumber daya negara termasuk peran laki-laki dan perempuan, kedua negara ini masih belum dapat membaca kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan yang sesungguhnya merupakan cermin dari keadilan gender itu sendiri. Perempuan hanya diikutsertakan dalam pembangunan (*add in*) tanpa melihat bagaimana sebetulnya kondisi serta akses yang ada dilapangan. Di Indonesia, perempuan memang menjadi aktor yang mendominasi sektor industri ini. Namun modal dan kesejahteraan untuk para perempuan kurang diperhatikan. Sementara di Thailand, perempuan memang menjadi pelaku dalam pembangunan yang menghasilkan pendapatan, namun kesehatan dan hak reproduksi serta keamanan mereka tidak dijamin secara penuh sekalipun telah ada beberapa aturan hukum yang dirancang untuk melindungi hak perempuan. Sayangnya, beragam perlindungan hak tersebutpun kerap kali tidak dapat menyentuh mereka para perempuan yang terperangkap dalam prostitusi.

Ironi lain yang terjadi dalam fenomena

partisipasi perempuan dalam sektor industri kreatif adalah, pengembangan industri kreatif di kedua negara ini justru lebih condong pada model pembangunan liberal yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa model ini kerap meminggirkan kelompok rentan seperti perempuan. Memang benar adanya jika sektor industri kreatif di kedua negara dalam studi ini menyumbang cukup besar pada perekonomian masing-masing negara. Namun, dengan melihat fakta bahwa perempuan hanya “ditambahkan” sebagai aktor di dalamnya dan fakta ketimpangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di industri ini menunjukkan bahwa kelemahan model pembangunan liberal yang mengesampingkan faktor manusia menjadi nyata adanya. Sekalipun cenderung lebih fleksibel dalam pembagian kerja/sektor antara laki-laki dan perempuan, nyatanya sektor ini belum mampu memberikan apresiasi lebih di mana perempuan mendominasi pada subsector tertentu, seperti subsector kuliner dan fashion. Oleh karena itu, sudah selayaknya politik dalam sektor industri kreatif yang dapat menjadi potensi industri yang cukup menjanjikan bagi perempuan untuk dapat berpartisipasi di dalamnya, perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, serta semangat pemberdayaan perempuan.

## Simpulan

Sekalipun sektor industri kreatif telah direncanakan dapat menjadi akses baru yang dapat mendorong pembangunan dengan turut menyertakan perempuan dalam pembangunan, pada kenyataannya implementasi dari kebijakan industri kreatif yang telah direncanakan seringkali masih jauh dari harapan untuk dapat mengikutsertakan perempuan dalam arus besar pembangunan dengan memperhatikan segala macam kebutuhan spesifik dan kesejahteraan perempuan. Melibatkan perempuan dalam pembangunan, bahkan dalam segala sector tidak hanya terbatas pada sector industri kreatif, memerlukan peran perempuan dari hulu hingga hilir kebijakan tersebut. Kesadaran untuk menempatkan perempuan tidak hanya sebagai objek sasaran produk kebijakan harus mulai dibangun sesegera mungkin karena perempuan juga memiliki hak untuk menjadi subjek yang menentukan nasibnya dalam proses

perumusan kebijakan yang dimaksud.

Ketika sebuah negara berkomitmen untuk memberikan peran kepada perempuan dalam pembangunan nasionalnya, sudah sewajarnya negara juga memberikan peran bagi perempuan dalam proses perumusan kebijakan sehingga pada saat kebijakan pembangunan diimplementasikan, peran perempuan tidak hanya sebagai aktor tambahan dalam sebuah kebijakan. Oleh karena itu dalam kaca mata gender dan pembangunan, yang terjadi dalam industri kreatif di Indonesia dan Thailand masih dalam tataran *women in development*. Kedua negara ini masih cenderung hanya “menambahkan” perempuan dalam roda pembangunan nasional tanpa ada upaya bagi pemberdayaan yang signifikan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengembangan sumber daya manusia dan berbagai pelatihan yang dapat menjadi bekal bagi perempuan dalam pembangunan. Padahal, jika pemerintah mampu melibatkan peran perempuan sejak proses perumusan dan lebih menitik beratkan pada semangat pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perempuan, sector industri kreatif dapat menjadi lahan baru bagi perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberian pelatihan dan modal bagi perempuan pelaku industri kreatif juga diperlukan di kedua negara ini. Khusus untuk Thailand, dikarenakan kondisi tingkat pendidikan pekerja perempuan justru lebih baik daripada laki-laki, mencari sebab diskriminasi terhadap perempuan dalam pekerjaan menjadi hal kunci yang perlu dilakukan agar diskriminasi dalam lingkungan kerja termasuk industri kreatif dapat dihentikan.

## Daftar Pustaka

(Bappenas), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. *Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional: Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014. [perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20905-\[\\_Konten\\_\]...](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20905-[_Konten_]...)

Huntington, Samuel P, dan Joan Nelson. “Partisipasi politik di negara berkembang,” 1994.

Intaratat, Kamolrat. “Women homeworkers in Thailand’s digital economy.” *Journal of International Women’s Studies* 18, no. 1 (2016): 87–103.

Jackson, Peter A. “Thai research on male homosexuality and transgenderism and the cultural limits of Foucaultian analysis.” *Journal of the History of Sexuality* 8, no. 1 (1997): 52–85.

Jithitikulchai, Theepakorn. “Do Thai Women Earn Less Than Men in Thailand?” *Available at SSRN 2984737*, 2016.

Khorpetch, Chatmanee, dan Kiriya Kulkolkarn. “Gender Wage Discrimination in the Thai Labor Market (in Thai).” *Applied Economics Journal* 18, no. 2 (2011): 17–31.

Liao, Lusi, dan Sasiwimon Warunsiri Paweenawat. “Parenthood Penalty and Gender Wage Gap: Recent Evidence from Thailand Abstract.” *Research Workshop Are Gratefully Acknowledged* 1, no. 102 (2019): 47–47.

Maithongdee, N. “Gender discrimination and wage differentials: The case of private employees in professional occupations.” *Unpublished master’s thesis*. National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand, 2010.

Minh-Tam Thi Bui, dan Chompoonuh Kosalakorn Permpoonwiwat. “Gender Wage Inequality in Thailand: A Sectoral Perspective.” *International Journal of Behavioral Science* 10 (2015): 2. <https://doi.org/10.14456/IJBS.2015.40>.

Mosse, Julia Cleves. *Half the world half a chance: An introduction to gender and development*. Oxfam GB, 1993.

Mutsalklisana, C. S. “Essays in labor and development economics.” Disertasi, University of California, 2011.

Nafziger, E W. “From Seers to Sen: The Meaning of Economic Development.” *Research Paper*, no. June 2005 (2006): 17. [https://doi.org/10.1057/9780230801462\\_3](https://doi.org/10.1057/9780230801462_3).

- Nakavachara, Voraprapa. "Superior female education: Explaining the gender earnings gap trend in Thailand." *Journal of Asian Economics* 21, no. 2 (2010): 198–218.
- Parivudhiphongs, Alongkorn. "IS THERE A CREATIVE INDUSTRIES POLICY IN THAILAND? ACTORS, IDEAS AND THE POLICY PROCESS\*." London, UK, 2015.
- . "Is there a creative industries policy in thailand? Actors, ideas and the policy process." Montreal: Routledge, 2015.
- Pinney, Edward L. "Aspects of Political Development. By Lucian W. Pye. The Little, Brown Series in Comparative Politics. (Boston and Toronto: Little, Brown and Company, 1966. Pp. Ix, 205. 5.00.)." *American Political Science Review* 61, no. 1 (Maret 1967): 208–9. <https://doi.org/10.1017/S0003055400132757>.
- Rai, Shirin. *Gender and the political economy of development: from nationalism to globalization*. Polity Press, 2002.
- Rathgeber, Eva M. "WID, WAD, GAD: Trends in research and practice." *The journal of developing areas* 24, no. 4 (1990): 489–502.
- Razavi, Shahrashoub, dan Carol Miller. "From WID to GAD : Conceptual Shifts in the Women and Development Discourse." *Occasional paper* 1, no. February (1995): 1161–64. <https://doi.org/10.1001/archneur.63.8.1161>.
- Romanow, Liza. "The Women of Thailand." *Global Majority E-Journal* 3 (2012). /paper/The-Women-of-Thailand-Romanow/d091db32457e8009e2db60f.
- Stricklin, William A. *The Prince and I - Miss Olive*, 2019.
- Trading Economics. "Labor Force Participation Rate, Male," 2021. <https://tradingeconomics.com/thailand/labor-force-participation-rate-female-percent-of-female-population-ages-15-64-modeled-ilo-estimate-wb-data.html%20pada%2019%20mei%202021>.
- Trisninawati. "Pengembangan Sumber Daya Manusia Bagi Pengusaha Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Kreatif (Studi Kasus Industri Kerajinan Tenun Songket Di Kota Palembang)." *Prosiding Seminar Nasional Economic Globalization Trends & Risk for Development Country.*, 2014.
- Wathanumsuk, J., S. Sajjanand, dan O. Srisawaluk. "Gender Pay Gap: A Case study of Automobile Industry at Well Grow Industrial Estates in Chachoengsao Province." Nonthaburi, Thailand: Sukhothai Thammathirat Open University, 2012.
- Wingfield, Tom. "Democratization and economic crisis in Thailand: Political business and the changing dynamic of the Thai state." Dalam *Political Business in East Asia*, disunting oleh Edmund Gomez, 1st ed. London: Routledge, 2003. <https://doi.org/10.4324/9780203166338>.
- Winter, Sam, dan Nuttawut Udomsak. "Male, female and transgender: Stereotypes and self in Thailand." *International Journal of Transgenderism* 6, no. 1 (2002): No Pagination Specified-No Pagination Specified.

## STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal ( <b>bold</b> ).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring ( <i>italic</i> ) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. <b>Pendahuluan</b> B. <b>Sejarah Pondok Pesantren...</b> 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan <b>Abstrak</b> (Indonesia) atau <b>Abstract</b> (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal ( <b>bold</b> ), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring ( <i>italic</i> ). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750.</li> <li>2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>).</li> <li>3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring.</li> <li>4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>.</li> <li>5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>).</li> <li>6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170.</li> <li>7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik.</li> <li>8) Diketik 1 spasi.</li> </ol>
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks.</li> <li>2) Kata <b>DAFTAR PUSTAKA</b> (Indonesia), <b>REFERENCES</b> (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan <b>cetak tebal (bold)</b>.</li> <li>3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988.</li> <li>4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.</li> </ol>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

### A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḥ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek      a =         i =         u =     
 Panjang    ā =         ī = إي      ū = أو  
 Diftong    ay = إي      aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

*Ta’marbūtah* ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

### B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.



ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7